

BAB I

PENDAHULUAN

A. PEMBERITAAN DUGAAN REKAYASA KRIMINALISASI KPK PASCA MAHKAMAH KONSTITUSI MEMPERDENGARKAN REKAMAN PENYADAPAN TELEPON OLEH KPK

B. (Studi Analisis Isi Pemberitaan Surat Kabar Kompas bulan Oktober – November 2009 tentang Dugaan Rekayasa Kriminalisasi KPK Pasca Pemutaran Rekaman Penyadapan Telepon Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi)

C. Latar Belakang Masalah

Kriminalisasi KPK telah menjadi rahasia publik. Upaya kriminalisasi semakin jelas ketika anggota-anggota KPK berulang kali menerima tuduhan-tuduhan kriminal mulai dari penyalahgunaan wewenang, pemerasan dan penyuaipan. Tuduhan penyalahgunaan wewenang dialamatkan KPK dengan alasan menyadap tanpa alasan yang jelas terhadap Kabareskrim Susno Duadji, pencabutan pencekalan Djoko Tjandra. Penyalahgunaan ini tidak terbukti karena penyadapan tidak ditujukan kepada Susno Duadji, sementara surat pencabutan pencekalan terbukti palsu (Kompas, 3 November, 2009).

Pemerasan dituduhkan kepada KPK karena pimpinan KPK telah memeras Anggoro Widjaya, tersangka korupsi yang sekarang berada di Singapura. Melalui

adiknya, Anggodo Widjaya, telah diserahkan sejumlah uang. Namun tuduhan ini pun tidak terbukti. Penyuaipan juga terbantahkan karena uang suap yang berasal dari Anggodo tidak sampai ke tangan pimpinan KPK. Tidak ada satupun bukti yang membuktikan bahwa pimpinan KPK telah menerima suap dari Anggodo Widjaya.

Berbagai konferensi pers oleh pimpinan KPK telah membuka mata publik tentang adanya konspirasi untuk menjerat pimpinan KPK. Bahkan dua di antaranya yaitu Chandra Hamsah dan Bibit Samad Rianto dijadikan tersangka. Meskipun demikian, keduanya tidak ditahan karena dianggap kooperatif (Kompas, 25 Oktober 2009). Tetapi, karena muncul pemberitaan transkrip rekaman yang mengindikasikan adanya rekayasa terhadap KPK, Mabes Polri kemudian menahan Chandra Hamsah dan Bibit Samad Rianto. Dugaan rekayasa kriminalisasi KPK semakin hari semakin kentara.

Penahanan tersebut telah menimbulkan solidaritas dan dukungan publik. Anehnya, Presiden dalam konferensi persnya justru memberikan pernyataan yang tidak aspiratif terhadap publik. Presiden mengatakan bahwa penahanan Chandra Hamsah dan Bibit Samad Rianto sama dengan penahanan terhadap penyelenggara negara lainnya sehingga kasus penahanan ini tidak luar biasa, tidak unik dan tidak khas sehingga tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Pernyataan ini membuktikan presiden tidak paham atau justru jadi bagian dari pihak yang menghendaki lemahnya KPK (Kompas, 30 Oktober 2009).

Penahanan keduanya ditambah pernyataan keliru Presiden tersebut semakin menguatkan dukungan publik terhadap KPK sehingga sehari kemudian memaksa Presiden untuk meralat sikapnya dengan membentuk Tim Pencari Fakta. Indikasi

rekayasa KPK menjadi terbuka lebar setelah Mahkamah Konstitusi memerintahkan barang bukti berupa rekaman pembicaraan rekayasa KPK agar diperdengarkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi (Kompas, 2 November 2009). Dari sinilah terungkap jelas siapa saja petinggi Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI yang diduga merekayasa penahanan Chandra Hamsah dan Bibit Samad Rianto.

Pemberitaan tentang dugaan kriminalisasi KPK semakin kencang setelah rekaman diperdengarkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Berita seputar kriminalisasi KPK terus menjadi berita utama di berbagai surat kabar harian. Hari demi hari, masyarakat mengikuti bagaimana perkembangan sampai di mana penanganan kasus tersebut. Ada banyak pihak yang nama-namanya terlibat atau disebutkan dalam pembicaraan telepon yang diputar di Mahkamah Konstitusi, di antaranya adalah RI 1, Wakil Jaksa Agung A.H. Ritonga, Kabareskrim Susno Duadji, Mantan Jamintel Wisnu Subroto, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lukas, Anggodo, Sitomerang sebagai pengacara Anggoro Widjaya, Yuliana, dan banyak lagi orang-orang yang tidak disebutkan namanya yang diduga para penyidik.

Transkrip pembicaraan tersebut tersebar luas melalui berbagai media massa, baik TV maupun surat kabar harian. Tersebarnya transkrip pasca pemutaran hasil penyadapan di Mahkamah Konstitusi melengkapi pemberitaan rekaman hasil penyadapan yang dua hari sebelumnya telah tersebar luas melalui surat kabar harian. Berita tersebut telah memancing emosi publik yang dilampiaskan dengan terus mengalirnya dukungan terhadap KPK dan demonstrasi-demonstrasi menuntut

penangkapan segera terhadap orang-orang yang telah terlibat dalam rekaman tersebut (Kompas, 1 November 2009).

Meskipun rekaman mengindikasikan telah adanya rekayasa, pemberitaan oleh media sudah seharusnya tetap menjaga obyektivitas berita. Pembuat berita tidak seharusnya terbawa emosi sehingga menampilkan berita-berita subyektif yang menyudutkan salah satu pihak tanpa didukung fakta yang kuat. Tetapi, hal ini pun dianggap sebagai sebuah kewajaran apabila didasarkan pada visi dan misi pemberantasan korupsi. Dalam konteks ini, pemberitaan tentang rekayasa KPK oleh Harian Kompas sepintas telah menjaga obyektivitas berita. Aspek yang menarik diteliti dari pemberitaan oleh Kompas adalah bagaimana kecenderungan pemberitaan Kompas terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia dengan tetap menjaga obyektivitas berita.

Berita-berita di surat kabar dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mempengaruhi opini publik sehingga suatu berita memiliki kecenderungan tertentu. Hasrullah (1999: 2) meneliti pemberitaan di Kompas, Republika dan Suara Karya tentang konflik PDI tahun 1996. Hasil temuan memperlihatkan ada kecenderungan ketiga Surat kabar telah dimanfaatkan sebagai saluran komunikasi politik untuk membentuk opini publik. Surat kabar telah berfungsi ganda yaitu di samping berfungsi sebagai saluran komunikasi politik juga berfungsi sebagai komunikator politik. Pemberitaan Megawati di arena KLB dan Munas PDI, telah menjadi berita utama, bahkan ada kecenderungan media berada dibelakang Mega. Ini terlihat dari penempatan berdasarkan letak halaman, analisa isi berita dan opini, maupun dengan memperhatikan kecenderungan berita dan opini yang bernada mendukung.

Kecenderungan pemberitaan yang berbeda-beda antara berita di satu surat kabar dengan surat kabar lainnya memperlihatkan bahwa surat kabar tetap tidak 100% netral. Penelitian Subandini (2005: 4) terhadap berita di harian Waspada dan Kompas tentang konflik di Aceh menunjukkan perbedaan jumlah berita antara harian Waspada dan Kompas. Pemihakan isi pesan lebih cenderung bersifat netral dengan sifat pesan yang informatif. Sumber berita yang dipakai kedua media, didominasi militer dan birokrasi, sebaliknya pemberitaan oleh harian Wawasan menggunakan sumber dari sumber lain. Pilihan narasumber bukan semata-mata alasan teknis, tetapi juga ada alasan politis yaitu memberikan pemihakan kepada pihak tertentu atau tujuan tertentu.

Kecenderungan pemberitaan ini diperkuat dengan penelitian Ngatif dkk (2005: 2) yang meneliti tentang pemberitaan pertanian oleh surat kabar daerah: studi kasus pada rubrik Kanda Raha-raja-SKH Kedaulatan rakyat. Terkait dengan rubrik khusus pertanian, nampaknya SKH. Kedaulatan Rakyat memiliki potensi yang besar dalam memberikan kontribusi pada proses penyebarluasan informasi dan pesan-pesan pembangunan pertanian dan pedesaan di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Pemilihan berita, sumber berita dan arah pemberitaan di kedua surat kabar ini adalah hasil dari kebijakan Dewan Redaksi. Dengan demikian, berita-berita di surat kabar selalu memiliki kecenderungan tertentu menurut maksud, tujuan, atau kepentingan tertentu.

Ketiga penelitian di atas memperlihatkan bahwa setiap berita selalu menjadi penyebar informasi kepada masyarakat sehingga membentuk suatu pengetahuan atau opini publik. Tetapi, berita-berita di surat kabar memiliki kecenderungan tertentu yang mencerminkan keberpihakan media terhadap suatu ide, ideologi, kepentingan atau pihak tertentu. Idealnya, berita tetap harus obyektif dalam menyajikan informasi pada masyarakat. Seperti pada penelitian yang lain, Penelitian terhadap pemberitaan Surat

Kabar Kompas bulan Oktober – November 2009 tentang Dugaan Rekayasa Kriminalisasi KPK Pasca Pemutaran Rekaman Penyadapan Telepon dalam Sidang Mahkamah Konstitusi ini juga memiliki kecenderungan tertentu yang menarik untuk diungkap melalui analisis isi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan permasalahannya adalah: bagaimana pemihakan Kompas dalam pemberitaan tentang Dugaan Rekayasa Kriminalisasi KPK Pasca Pemutaran Rekaman Penyadapan Telepon Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi?

E. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemihakan Kompas dalam pemberitaan tentang Dugaan Rekayasa Kriminalisasi KPK Pasca Pemutaran Rekaman Penyadapan Telepon Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi awal bagi kalangan pemerhati surat kabar mengenai pemberitaan serta pengembangan penelitian bagi studi komunikasi jurnalistik, khususnya yang meneliti tentang analisis isi berita dalam media surat kabar

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi umpan balik bagi Surat Kabar Harian Kompas tentang pemberitaan penegakan hukum, terutama yang bersentuhan dengan ranah politik.

B. Landasan Teori

1. Media Massa

Komunikasi oleh Kuswandi (1996: 16) dikatakan sebagai suatu istilah yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu *Common* yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Inggris menjadi “*shared by alike*”. Oleh karena itulah, maka suatu komunikasi pada prinsipnya haruslah bersifat dua arah dalam rangka pertukaran pikiran (*idea*) dan informasi menuju pada pengertian dan makna bersama.

Secara singkat, komunikasi massa dipahami sebagai komunikasi melalui media massa. Media yang dimaksud pada umumnya adalah berupa surat kabar, radio, televisi, dan film. Devito (1997: 506-507) menjelaskan pengertian komunikasi massa dengan menyajikan variabel-variabel yang membentuk komunikasi massa yaitu: Sumber, khalayak (*audience*), pesan, proses, dan konteks. Sumber adalah komunikator massa yang telah mengeluarkan biaya besar untuk menyusun dan mengirimkan pesan. Khalayak merupakan orang pada umumnya yang menerima pesan dari komunikator. Pesan yang disajikan dalam komunikasi massa bersifat umum sehingga dapat dipahami oleh masyarakat pada umumnya.

Lasswell (Wahyuni, 2000: 10) melihat fungsi media massa terhadap masyarakat pada tataran ideal adalah sebagai berikut:

- a. Media massa berfungsi sebagai pengamat lingkungan, pemberi informasi tentang hal-hal yang berada di luar jangkauan penglihatan masyarakat luas.
- b. Media massa berfungsi melakukan seleksi, evaluasi dan interpretasi informasi. Media massa menyeleksi apa yang pantas dan perlu disiarkan.
- c. Media massa berfungsi sebagai sarana penyampaian nilai dan warisan sosial budaya dari satu generasi kepada generasi lainnya.

Melihat fungsi-fungsi di atas, maka peran media massa perlu mendapatkan kontrol secara berimbang tanpa harus mematikan kreatifitas pekerja media. Karena itu, media massa harus selektif dalam menampilkan suatu berita atau informasi. Media massa menjalankan fungsi media berita dan penerangan, media pendidikan, media hiburan dan media promosi (Devito, 1997: 515).

Media massa, dalam hubungannya dengan publik menduduki posisi yang sangat strategis karena beberapa alasan. Pertama, media memiliki kemampuan memfokuskan perhatian, mengarahkan masyarakat agar memberikan perhatian yang lebih intens terhadap suatu persoalan, memperluas wawasan masyarakat dalam rangka membawa masyarakat ke alam yang lebih maju, menumbuhkan aspirasi nasional untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, serta memperluas dialog tentang kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan (Wahyuni, 2000: 7).

Pandangan demikian terlalu ideal dan normatif karena pada kenyataannya media massa tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan pihak-pihak tertentu. Dalam pandangan konstruksionis, media bukanlah sekedar saluran bebas, ia juga subyek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan bias dan

pemihakannya. Di sini media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas (Eriyanto, 2002: 45).

Secara substantif, media massa merupakan alat komunikasi yang menyampaikan informasi dari sumber informasi kepada masyarakat luas sehingga media massa juga menjadi alat yang sangat ampuh untuk membentuk opini publik. Karena itu, tidak menutup kemungkinan, media massa juga menjadi alat bagi pemiliknya atau kelompok-kelompok tertentu untuk mempengaruhi pihak lain atau masyarakat luas. Secara positif, media massa menjadi alat untuk menyebarkan informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat ke arah yang lebih konstruktif. Secara negatif, media massa dapat menjadi alat pihak-pihak tertentu untuk mengejar kepentingannya sendiri seperti kekuasaan, pengaruh, kemenangan politik, pembentukan opini yang berpihak pada pihak tertentu dan sebagainya (Sobur, 2004: 29). Dilihat dari posisi ini, media massa tidak dapat bersikap netral.

Media massa dikatakan tidak netral berangkat dari kenyataan bahwa para pelaku media terikat oleh subyektifitas dirinya seperti paradigma berpikir, sudut pandang, wawasan, pergaulan dirinya di tengah masyarakat dan sebagainya. Nilai dan ideologi wartawan selalu melekat dan mempengaruhi proses peliputan dan pelaporan suatu peristiwa. Lebih dari itu, wartawan telah menjadi partisipan dari kelompok yang ada di masyarakatnya, khususnya kelompok dominan sehingga dalam proses peliputan atau pelaporan senantiasa menunjukkan keberpihakannya pada suatu

kelompok (Sobur, 2004: 32-33). Hasilnya, berita-berita yang ditampilkan media massa pasti mencerminkan ideologi wartawan dan kepentingan politik tertentu.

Pandangan di muka memberikan suatu pemahaman bahwa media tidak semata-mata merekam realitas yang terjadi di lingkungannya. Media massa ikut aktif memproduksi makna-makna baru berdasarkan realitas yang telah dimanipulasikan dengan pemilihan kata-kata dan penyusunan kalimat sedemikian rupa berdasarkan keberpihakannya terhadap pihak tertentu. Dalam konteks ini, insan pers baik wartawan, editor, maupun redaktur memiliki peran sangat sentral. Mereka ini tidak dapat dipandang dari sisi profesinya tetapi harus ditempatkan dalam konteks politik dan ideologi tertentu.

2. Berita

Teks berita apabila dibedah dari sudut narasinya, terdapat dua sisi yang saling bertolak belakang (oposisi). Dalam upaya membuat peristiwa menjadi bermakna bagi penerima berita/khalayak, artinya khalayak akan membaca berita tersebut. Karena pada dasarnya berita bukan suatu ruang vakum, melainkan layaknya sebuah cerita, mengapa, mengajak pembaca berdialog.

Bentuk penyapaan tersebut adalah asumsi siapa dan apa khalayak dari media. Asumsi ini menyediakan konstruksi dari sebuah citra bagaimana wartawan menempatkan dirinya dalam peta ideologis tertentu. Asumsi ini dijadikan dasar bagaimana peristiwa tiap hari dimaknai (Eriyanto, 2002: 55). Secara singkat dapat dikatakan bahwa berita yang ditampilkan bukan sesuatu yang netral dan apa adanya,

melainkan merupakan hasil liputan wartawan yang memiliki keberpihakan terhadap kepentingan ideologis tertentu (Eriyanto, 2002: 13).

Berita pada surat kabar ditulis berdasarkan hasil perekaman wartawan terhadap realitas suatu peristiwa. Bagaimana suatu berita ditulis, dikemas, dan ditampilkan tidak lepas dari pertimbangan-pertimbangan nilai dan ideologis para pekerja pers, khususnya wartawan. Suatu fakta dapat dikemas menjadi berita yang menarik apabila diawali dengan judul berita yang menarik pula meskipun pesan yang disampaikan cukup sederhana. Sebaliknya, suatu fakta dapat dikemas menjadi berita ringan apabila berita tersebut tidak menonjolkan pesan yang dapat menarik perhatian publik.

Berita dari surat kabar harian diberi pengertian sebagai informasi yang melaporkan segala sesuatu yang terjadi dalam 24 jam antara *deadline* hari kemarin dan *deadline* hari yang akan datang. Berita dapat dibentuk atau diciptakan. Berita juga merupakan hasil dari proses produksi berita. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses produksi berita. *Pertama*, produksi berita dimulai dari bagaimana wartawan mempersepsi fakta atau peristiwa yang akan diliputnya. Dalam proses ini, perspektif-perspektif subyektif wartawan memainkan peran yang sangat penting.

Kedua, rutinitas organisasi. Organisasi media selalu mempunyai kebiasaan-kebiasaan kerja, baik mengenai waktu kerja, pembagian kerja, koordinasi dengan sejawat, tahapan-tahapan dalam proses kerja dan sebagainya. Rutinitas kerja antara organisasi media yang satu dengan yang lain tentu memiliki ciri khasnya yang ikut mempengaruhi bagaimana suatu berita dihasilkan.

Ketiga, nilai berita. Suatu realitas akan ditulis menjadi berita apabila memiliki nilai berita berdasarkan pertimbangan atau kepentingan organisasi media. Suatu peristiwa dipandang memiliki nilai berita apabila (Pasqua, *et al*, 1990: 50-51):

- a. Peristiwa tersebut menarik emosi khalayak. Masyarakat pembaca akan tertarik dengan berita-berita yang menyentuh perasaan atau nilai-nilai kemanusiaannya. Pemberitaan dapat terseret pada pemihakan terhadap apa yang menarik emosi massa tetapi kurang obyektif.
- b. Peristiwa tersebut menjadi peristiwa besar. Suatu peristiwa besar tentu akan menarik perhatian masyarakat untuk membaca berita tersebut. Keinginan untuk mengungkap suatu peristiwa dapat menyebabkan suatu berita disajikan dengan cara melebih-lebihkan sehingga menjadi tidak berimbang.
- c. Peristiwa tersebut mengandung konflik. Setiap konflik selalu menarik untuk diperbincangkan dan menarik untuk diberitakan dan dibaca. Realitas konflik berpotensi diberitakan secara tidak berimbang karena kecenderungan untuk memihak pada salah satu pihak yang berkonflik.
- d. Peristiwa tersebut banyak diberitakan. Setiap kejadian yang menjadi perhatian masyarakat akan menarik ketika diberitakan. Masyarakat akan mencari sumber berita tertulis untuk mengetahui bagaimana peristiwa tersebut telah diperbincangkan oleh masyarakat luas. Biasanya media akan melihat media-media lain, khususnya media dari luar negeri untuk mendapatkan berita.

- e. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang tidak biasa. Suatu peristiwa meskipun sederhana, tidak dibicarakan banyak orang, bukan peristiwa besar, tapi akan menjadi berita menarik apabila peristiwa tersebut tidak biasa terjadi.

Berita tentang kriminalisasi KPK telah memancing emosi masyarakat untuk memberikan pembelaan kepada KPK. Masyarakat membutuhkan berita-berita tentang KPK dan mengharapkan berita tentang keberhasilan KPK dalam menghadapi kriminalisasi tersebut. Dalam kondisi seperti ini, suatu berita dapat terbawa arus untuk menjadi tidak obyektif dalam menyajikan berita. Wartawan dapat memberitakan kriminalisasi KPK sesuai dengan kehendak emosional masyarakat sehingga masyarakat menganggap berita yang disajikan sebagai bernilai dan obyektif.

Semakin banyak muatan nilai berita yang terdapat dalam suatu peristiwa, semakin besar pula berita tentang peristiwa tersebut ditampilkan. Oleh karena itu, berita-berita yang akan dimuat dalam surat kabar selalu melalui faktor *keempat*, yaitu kategorisasi. Berita dikategorikan menjadi (Eriyanto, 2002 : 108).

- a. *Hard news* yaitu berita dari suatu peristiwa yang sangat dibatasi oleh waktu sehingga apabila terlambat diberitakan akan kehilangan aktualitasnya.
- b. *Soft news* yaitu berita dari suatu peristiwa yang menarik dan akan selalu menarik untuk diberitakan tanpa terikat oleh suatu waktu atau *event* lain sehingga meskipun ditunda pemberitaannya, nilai berita tersebut tidak akan kehilangan aktualitasnya.
- c. *Spot news* yaitu berita yang masuk dalam kategori *hard news* dari suatu peristiwa yang tidak dapat diprediksikan.

- d. *Continuing news* yaitu berita yang masuk dalam kategori *hard news* dari suatu peristiwa yang dapat diprediksikan dan peristiwa tersebut terus berkelanjutan.
- e. *Developing news* berita yang masuk dalam kategori *hard news* dari suatu peristiwa sebagai bagian dari rangkaian berita sebelumnya.

Keinginan untuk menghasilkan berita secara cepat dan tepat waktu dapat mendorong wartawan untuk melakukan menulis berita tanpa ada kroscek informasi dari narasumber lain sehingga berita yang dihasilkan menjadi kurang berimbang.

Berita oleh masyarakat umum sering dipersepsikan sebagai sesuatu yang obyektif karena berita ditulis berdasarkan fakta-fakta yang berhasil direkam oleh pekerja media. Berita yang ditampilkan dan disajikan kepada masyarakat dipandang juga sebagai hasil penyuntingan berita yang mengambil informasi dari berbagai sumber secara apa adanya sehingga media massa dapat berperan sebagai penyebar informasi yang netral dan berimbang. Media dapat bertindak secara obyektif dalam menyampaikan suatu fakta kepada masyarakat pembaca.

3. Ketidakberpihakan Media

Eriyanto (2002 : 15-16) dalam bukunya Analisis Framing mengungkapkan bahwa setiap orang yang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial dengan konstruksinya masing-masing. Sebagai contoh tentang demonstrasi mahasiswa. Suatu kelompok dapat mengkonstruksi gerakan mahasiswa tersebut sebagai anarkis, di luar batas, dan mengganggu masyarakat serta dijadikan alat permainan politik tertentu. Tetapi, kelompok lain bisa jadi mengkonstruksi gerakan tersebut adalah memperjuangkan nasib rakyat, dan berjuang tanpa pamrih. Konstruksi yang mereka

buat itu dilengkapi dengan legitimasi tertentu, sumber kebenaran tertentu, bahwa apa yang mereka katakan dan percayai itu adalah benar adanya, punya dasar yang kuat.

Media massa sebagai lembaga kemasyarakatan membantu menyampaikan keinginan masyarakat kepada pemerintah lewat laporan yang diberitakan kepada masyarakat luas. Media massa tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga berusaha memotivasi dan mencerdaskan masyarakat. Dalam hal ini, jurnalis sebagai bagian dari media massa juga dituntut untuk seimbang dalam menuliskan laporannya, baik dari pihak masyarakat maupun pemerintah.

Jurnalis tidak boleh memihak salah satu pihak atau hanya menyuarakan pihak tertentu. Semua pihak memiliki hak yang sama atas akses informasi. Saat bertugas, jurnalis memiliki komitmen untuk mencari berita dan menginformasikannya kepada pembaca sesuai standar teknis dan etika jurnalistik. Untuk memenuhi tuntutan profesionalisme itu, jurnalis harus selalu menjaga sikap obyektif, berimbang, akurat, dan benar sehingga berada dalam posisi independen. (Rahayu, 2006 : 132)

Imparsialitas atau ketidakberpihakan pemberitaan yaitu menyangkut keseimbangan (*balance*) penulisan berita yang meliputi (Kriyantono, 2006 : 241):

- a. *Balance*, yaitu apabila berita konflik tersebut dilihat dari dua perspektif, yaitu dari dari masing – masing pihak yang bertikai.
- b. Tidak *balance*, jika perspektif pemberitaan yang dipakai hanya dari satu pihak. Tidak ada kesempatan yang sama terhadap kedua pihak.

Dennis McOuail dalam bukunya *Media Performance* mengungkapkan bahwa :

“ The requirements of balanced reporting can be understood in different ways, depending mainly on number, relevance and status of the parties involved in an issue or event. It can be taken to require either equal attention to the main protagonists (e.g. management and unions in an industrial dispute or each

contending political party in an election campaign) or attention proportionate to the varying significance of the actor's involvement in a event (there are normally minor as well as major actors). “ (McQuail, 1992 : 201)

(Persyaratan dari laporan yang seimbang dapat dipahami dalam berbagai cara tergantung pada jumlah, relevansi, dan status dari badan – badan yang terlibat dalam suatu isu atau peristiwa. Dapat juga berupa perhatian yang seimbang pada tokoh utama (misalnya manajemen atau serikat dalam sebuah industri berdebat atau masing – masing melawan partai politik dalam sebuah kampanye pemilihan) atau perhatian seimbang pada keterlibatan berbagai macam tokoh yang signifikan pada sebuah peristiwa).

Balance (keseimbangan) sering diartikan sebagai keseimbangan dalam pemberitaan. Selain itu, ada juga pendapat yang menyamakan *balance* dengan ketidakberpihakan atau *non-partisanship* media dalam penyajian sebuah berita. Dalam kaitan ini, McQuail membedakan *balance* dengan netralitas. (McQuail, 1992 : 223) Menurut McQuail, *balance* berhubungan dengan seleksi dan substansi berita, sedangkan netralitas berhubungan dengan presentasi berita tersebut. *Balance* menghendaki adanya pemberian perhatian yang seimbang atau sama terhadap aktor – aktor yang terlibat dalam suatu peristiwa. *Balance* mensyaratkan adanya *equal or proportional access* yakni pemberian akses, kesempatan yang sama kepada semua aktor yang terlibat dan *even-handed evaluation* yakni pemilihan penilaian positif dan negatif yang berimbang untuk semua pihak yang terlibat dalam pelaporan berita.

4. Etika Pemberitaan

Berita-berita di surat kabar harus melaksanakan atau mematuhi etika pemberitaan. Suatu berita pertama-tama harus cermat dan tepat atau dalam bahasa jurnalistik harus akurat. Selain cermat dan tepat, berita juga harus lengkap (*complete*), adil (*fair*) dan berimbang (*balanced*). Kemudian berita harus tidak mencampurkan fakta dan opini sendiri atau dalam bahasa akademis disebut objektif. Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat (2006: 48-55) mengemukakan etika pemberitaan yang harus diikuti yaitu: 1) berita harus akurat, 2) berita harus lengkap, adil, dan berimbang, 3) harus objektif, dan 4) berita harus baru atau hangat. Keempat hal tersebut diuraikan lebih jelas berikut ini.

a. Berita Harus Akurat

Akurasi berita dimulai dari kecermatannya terhadap ejaan nama, angka, tanggal dan usia serta disiplin diri untuk senantiasa melakukan periksa-ulang atas keterangan dan fakta yang ditemuinya. Periksa ulang terhadap berita penting dilakukan karena suatu berita selalu dihasilkan dari distorsi berita atau pemadatan berita selama pengumpulan data oleh individu reporter atau wartawan dan upaya menjadikan adanya hubungan rasional antar fakta yang diliput (Strentz, 1993: 34).

Akurasi juga berarti benar dalam memberikan kesan umum, benar dalam sudut pandang pemberitaan yang dicapai oleh penyajian detail-detail fakta dan oleh tekanan yang diberikan pada fakta-faktanya. Kredibilitas sebuah media, sangat ditentukan oleh akurasi beritanya sebagai konsekuensi dari kehati-hatian para wartawannya dalam membuat berita. Budyatna (2006: 50) menjelaskan

bahwa akurasi berita tidak hanya menampilkan detail berita, tetapi juga kebenaran dari detail yang disajikan. Dalam hal ini, pembuat berita perlu *check and recheck* agar tidak termakan propaganda dari media lain.

b. Berita harus lengkap, adil dan berimbang

Keakuratan sesuatu fakta tidak selalu menjamin keakuratan arti. Fakta-fakta yang akurat yang dipilih atau disusun secara longgar atau tidak adil sama menyesatkannya dengan kesalahan yang sama sekali palsu. Dengan terlalu banyak atau terlalu sedikit memberikan tekanan, dengan menyisipkan fakta-fakta yang tidak relevan atau dengan menghilangkan fakta-fakta yang seharusnya ada di sana, pembaca mungkin mendapat kesan yang palsu. Berita harus adil dan berimbang berarti bahwa seorang wartawan harus melaporkan apa sesungguhnya yang terjadi secara apa adanya secara berimbang. Menurut Budyatna (2006: 53) keseimbangan berita dicapai dengan cara memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang dirugikan dalam pemberitaan untuk memberikan tanggapan. Kesempatan memberikan tanggapan bagi semua pihak yang menjadi sumber berita penting dilakukan karena penyajian berita yang bersifat sesegara mungkin agar berita selalu hangat, isi berita sangat ditentukan oleh sumber berita, sedangkan reporter sebagai pengumpul berita tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengolah berita (Strentz, 1993: 46).

c. Berita harus objektif

Pemberitaan yang obyektif artinya berita yang dibuat harus selaras dengan kenyataan, tidak berat sebelah, bebas dari prasangka. Memang ada

beberapa karya jurnalistik yang lebih persuasif, artinya ada sikap subjektif di dalamnya, dan objektivitasnya agak kendur, misalnya dalam tulisan editorial atau komentar. Sebuah *depth-reporting* (pemberitaan mendalam) maupun *investigative-reporting* (pemberitaan-investigasi) haruslah objektif, meski boleh memiliki suatu fokus pandangan, *point of view*. Memang untuk bersikap objektif 100 % sangat sulit, hampir tidak mungkin, karena latar belakang seorang wartawan acapkali mewarnai hasil karyanya.

Berita merupakan hasil konstruksi wartawan dan karenanya tidak akan pernah objektif 100%. Meskipun demikian, objektivitas tetap harus menjadi acuan nilai yang harus dikejar oleh seorang jurnalis dalam setiap pekerjaannya untuk menyiarkan berita. Prinsip objektivitas berkenaan dengan tugas wartawan untuk melakukan rekonstruksi (Severin dan Tankard, 2001) terhadap peristiwa. Berita merupakan laporan tentang fakta. Suatu peristiwa menjadi berita hanya apabila ditemukan dan dilaporkan oleh wartawan (Oetama, 1987: 195). Dengan demikian, setiap berita yang ditulis oleh wartawan merupakan hasil subjektivitas dirinya dalam mengonstruksikan sebuah peristiwa. Dalam hal ini, wartawan mengandalkan subjektivitas dirinya dalam menyebarkan berita kepada masyarakat. Jakob Oetama (1987: 173) mengungkapkan bahwa tidak ada objektivitas yang absolut, yang ada adalah objektivitas yang subjektif. Dalam mengumpulkan fakta, wartawan mengandalkan subjektivitas berbagai pihak, termasuk subjektivitas dirinya (Ashadi Siregar, 1998:58). Pemahaman terhadap subjektivitas dalam pemberitaan mendorong wartawan untuk sedapat

mungkin mengejar objektivitas sehingga prasangka, bias, dan pandangan-pandangan personal tidak akan menjadi dominan dalam proses pengumpulan (*gathering*), penyiapan (*preparing*), dan penyebaran (*desseminating*) berita.

Menurut Jakob Oetama (1987: 173), kewajiban etis wartawan dan masyarakat pers adalah kemauan dan itikad untuk menyajikan suatu kejadian dan permasalahan seobjektif mungkin. Suatu berita dikatakan objektif jika laporan tersebut mempunyai tingkat faktualitas yang tinggi, dimana laporan tersebut menawarkan sebanyak mungkin detil dan *checkable* (McQuail, 1992: 183). Perbedaan yang jelas antara fakta pada satu sisi, dan pendapat atau intepretasi pada sisi lain. Dimanapun memungkinkan, menurut McQuail, sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya disebutkan. Berita harus tepat waktu dengan menyajikan versi yang paling baru menyangkut dampak suatu peristiwa hingga penilaian-penilaian yang paling awal suatu peristiwa. Menyajikan berita dalam intonasi dan presentasi yang netral, lebih-lebih dalam situasi konflik. Menurut McQuail, objektif dalam pemberitaan mensyaratkan adanya penghilangan bias personal, kepentingan pribadi, dan motif-motif yang diorientasikan untuk melayani para pengiklan atau kelompok-kelompok ketiga.

Mencer (2000: 53) mengatakan bahwa ketika jurnalis berbicara tentang objektivitas maka yang ia maksudkan adalah berita yang bebas dari pendapat atau perasaan wartawan yang berisi tentang fakta dan yang berasal dari laporan independen dan tidak memihak. Sebuah berita dapat dikatakan objektif jika berita tersebut dapat dicek melalui bahan-bahan atau data-data terekam,

misalnya, daftar gaji pegawai, naskah pembicaraan atau wawancara, data tentang tingkat pengangguran, statistik utama, dan lain sebagainya.

Mencer (2000: 54) lebih lanjut memberikan saran bagaimana seorang wartawan dapat meraih objektivitas, (1) selalu melakukan cek dan ricek terhadap sumber berita, fakta atau peristiwa yang hendak dituliskan dalam pemberitaan; (2) selalu melakukan koreksi, termasuk dalam hal bahasa; dan (3) melakukan observasi langsung. Dengan cara ini, wartawan dapat lebih menjamin akurasi dalam pemberitaan. McQuail (2004: 172), mengatakan bahwa objektivitas dapat diraih dengan cara memberikan ruang dan waktu terhadap perspektif-perspektif alternatif atau berbagai versi fakta.

d. Berita Harus Hangat

Berita adalah padanan kata *news* dalam bahasa Inggris. Kata *news* itu sendiri menunjukkan adanya unsur waktu yaitu baru dan hangat. Strentz, (1993: 46) menyebutkan bahwa suatu berita memiliki batas waktu dan kesegeraann. Berita memiliki rentang hidup yang singkat. Setiap kantor berita berusaha menyampaikan informasi kepada khalayak sesegera mungkin sehingga suatu peristiwa yang sedang berlangsung atau isu yang beredar cepat diketahui oleh publik. Dalam hal menyajikan berita sesegera mungkin, apalagi dalam liputan langsung, sumber berita sangat menentukan isi dari apa yang disajikan khalayak.

C. Definisi Konseptual

Unit analisis dalam penelitian ini adalah berita-berita mengenai kriminalisasi KPK pasca pemutaran rekaman hasil penyadapan yang dimuat Harian Kompas pada bulan Oktober 2009 sampai dengan Desember 2009. Unit-unit yang dianalisis secara konseptual didefinisikan sebagai berikut:

1. Kategori berita adalah pemilahan berita berdasarkan nilai berita berdasarkan waktu atau *event* lain.
2. Kelengkapan unsur adalah nilai berita berdasarkan kelengkapan unsur berita, yaitu *what, who, where, when, why* dan *how*. pemberitaan harus berimbang dan tidak memihak kepada salah satu pihak.
3. Keseimbangan berita adalah pemberitaan harus seimbang dan tidak memihak
4. Kebaruan berita *adalah* berita harus memberitakan suatu peristiwa yang hangat atau baru.
5. Relevansi nara sumber adalah pemberitaan menggunakan nara sumber yang relevan dengan isi atau peristiwa yang diberitakan.

D. Definisi Operasional

1. Kategorisasi berita adalah pemberitaan KPK dengan melihat nilai berita berdasarkan kategori *hard news* dan *soft news*.
2. Kelengkapan unsur adalah nilai berita berdasarkan kelengkapan unsur berita yang diukur dengan melihat apakah berita memuat 5W+1H secara lengkap atau tidak.
3. Keseimbangan berita adalah pemberitaan tentang kriminalisasi KPK yang mengambil sumber dari satu sisi atau dari dua sisi.
4. Kebaruan berita adalah berita harus memberitakan suatu peristiwa yang hangat

atau baru. Disebut hangat apabila berita ditulis satu hari setelah suatu peristiwa terjadi. Tidak hangat apabila berita yang ditulis sudah terlebih dulu diberitakan oleh media lain.

5. Relevansi nara sumber adalah pemberitaan menggunakan nara sumber yang relevan dengan isi atau peristiwa yang diberitakan. Relevan apabila menggunakan narasumber yang mengungkapkan sesuatu yang relevan dengan berita. Tidak relevan apabila narasumber mengungkapkan sesuatu yang tidak relevan dengan berita.

Berdasarkan definisi konseptual di atas, unit analisis dalam penelitian ini ditampilkan di bawah ini.

Tabel 1. Unit Analisis

No	Unit Analisis	Kategorisasi
1	Kategori berita	a. Hard news b. Soft news
2	Kelengkapan unsur	a. Memuat 5W+ 1 H dengan lengkap b. Memuat 5W+ 1 H tidak lengkap
3	Keseimbangan berita	a. Satu sisi b. Dua sisi
4	Kebaruan berita	a. Hangat (jika berita ditampilkan maksimal 2 hari dari kejadian/peristiwa) b. Tidak hangat (jika berita ditampilkan lebih dari 2 hari dari kejadian)
5	Relevansi nara sumber	a. Nara sumber mengungkap sesuatu yang relevan dengan berita b. Nara sumber mengungkap sesuatu yang tidak relevan dengan berita

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan analisis isi, yaitu yaitu metode untuk mengamati dan menguraikan isi pesan komunikasi pada media massa. Metode analisis isi didefinisikan oleh Barelson sebagai teknik penelitian untuk ureritaaian yang obyektif, sistematis dan kuantitatif dari pengejawantahan isi komunikasi (McQuail, 1987:179). Menurut Neuman (2000:292) analisis isi adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan dan menganalisis isi dari suatu teks. Isi (content) mengarah pada kata, arti, gambar, simbol, ide, tema atau setiap pesan yang dapat dikomunikasikan.

Penelitian ini bersifat deskriptif, terutama untuk mendeskripsikan bagaimana keberpihakan harian Kompas dalam menampilkan pemberitaan kriminalisasi KPK pasca pemutaran traskrip hasil penyadapan di Mahkamah Konstitusi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi obyek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. (Bungin, 2001: 36).

2. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah pemberitaan-pemberitaan mengenai kriminalisasi KPK pasca pemutaran rekaman penyadapan telepon dalam sidang Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan kode etik pemberitaan. Penelitian ini menggunakan Surat Kabar Harian (SKH) Kompas. Alasan yang mendasari peneliti

memilih SKH Kompas karena berdasarkan observasi pendahuluan, Kompas merupakan surat kabar dengan oplah besar di tingkat nasional sehingga berita yang disajikan oleh Kompas memiliki jangkauan yang lebih luas dan pengaruh yang cukup kuat di tingkat nasional.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi dokumentasi yaitu mencermati pemberitaan tentang kriminalisasi KPK, terutama berita kriminalisasi pasca pemutaran transkrip rekaman di Mahkamah Konstitusi di harian Kompas bulan Oktober-November 2009.
- b. Kepustakaan, merupakan cara pengumpulan data dengan membaca buku, hasil penelitian yang telah ada dan atau literatur lain yang mendukung atau relevan dengan penelitian ini.
- c. Pengkodingan. Pengkodingan dipakai dalam melakukan analisis isi dan pengukuran terhadap unit analisis pemberitaan kriminalisasi KPK di harian *Kompas*. Pengkoding dalam penelitian ini adalah sebanyak 2 orang yang ditentukan oleh peneliti, yang dianggap mempunyai minat dan kemampuan terhadap topik penelitian. Kepada kedua pengkoding tersebut akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dan batasan-batasan dalam unit analisis dan kategorisasi yang berkaitan dengan lembar koding (*coding sheets*), agar nantinya dapat mempermudah dalam melakukan pengkodingan. Selanjutnya, akan

digunakan uji reliabilitas agar dalam penelitian ini mencapai hasil yang obyektif dan reliabel.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Konstruk dalam penelitian ini adalah etika pemberitaan. Unit analisis untuk mengukur keberpihakan pemberitaan dilihat dari kategori berita, kelengkapan unsur berita, kebaruan berita, dan relevansi narasumber.

5. Reliabilitas Data

Untuk membuktikan bahwa penelitian ini obyektif dan reliabel (dapat dipercaya) maka peneliti menggunakan pengkodean dengan dua orang pengkoding, dalam kasus ini melewati prosedur sebagai berikut:

- a. Peneliti sebagai *intercoder* memilih pengkoding pertama dan pengkoding kedua sebagai alat perbandingan. Pengkoding terdiri dari dua mahasiswa prodi komunikasi yang dianggap mempunyai ketertarikan dengan tema penelitian ini.
- b. Sebelum pengisian lembar koding, kepada mereka dijelaskan tentang batasan dan definisi unit analisis serta kategori yang telah ditetapkan.
- c. Intercoder memberikan 38 *coding sheet* dan 38 item artikel yang telah dipilih.

Dalam melakukan *intercoder reliability* dapat dilakukan dengan menggunakan formula yang digunakan Holsti dalam bukunya Joseph R. Dominick yang berjudul "*Mass Media Research an Introduction*" (Wimmer, dan Dominick, 2000). Dengan menggunakan data nominal dalam bentuk persentase pada tingkat persamaannya.

$$\text{Reliability} = \frac{2M}{N1+N2}$$

M : Jumlah keputusan *coding* dimana semua *coder* sepakat

N1+N2 : Jumlah keputusan *coding* yang harus dibuat oleh *coder* pertama dan kedua.

